



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIPIUS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 420827

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.155.000.000**

1. Tanah Seluas 961 m2 di KAB / KOTA SANGGAU, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m2/120 m2 di KAB / KOTA
SANGGAU, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/250 m2 di KAB / KOTA
SANGGAU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 471 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SANGGAU, WARISAN Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah Seluas 615 m2 di KAB / KOTA SANGGAU, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **606.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
260.000.000
3. MOTOR, BENELLI BS 200 MB/MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000



4. MOBIL, DAIHATSU ROCKY/MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
5. MOTOR, HONDA CRF Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
6. MOBIL, TOYOTA HADRTOP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	165.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	615.474.479
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.541.474.479
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.491.474.479

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.